

**GAYA KEPEMIMPINAN WALI NAGARI DALAM  
PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI DI KENAGARIAN  
SUMANIK DAN TABEK PATAH KECAMATAN  
SALIMPAUNG KABUPATEN TANAH DATAR**

**SKRIPSI**

*Diajukan Kepada Tim Penguji Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Publik FIS  
UNP Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Administrasi Publik*



**OLEH :  
FAKRI MARSAL  
14042024**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2018**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**

**GAYA KEPEMIMPINAN WALI NAGARI DALAM PENGELOLAAN  
KEUANGAN NAGARI DI KENAGARIAN SUMANIK DAN TABEK  
PATAH KECAMATAN SALIMPAUNG KABUPATEN TANAH DATAR**

Nama : Fakri Marsal  
TM/NIM : 2014/14042024  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik  
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 02 Agustus 2018

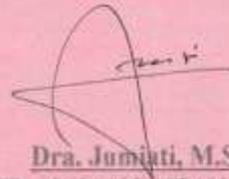
Disetujui Oleh:

**Pembimbing I**



**Drs. Svansir, M.Si, Ph. D**  
NIP. 19630401 198903 1 003

**Pembimbing II**



**Dra. Jumiati, M.Si**  
NIP. 19621109 198602 2 001

## HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi Jurusan  
Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Negeri Padang

Pada hari Kamis, 02 Agustus 2018 Pukul 13.00 s/d 14.00 WIB

**Gaya Kepemimpinan Wali Nagari Dalam Pengelolaan Keuangan Nagari di  
Kenagarian Sumanik dan Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten  
Tanah Datar**

Nama : Fakri Marsal  
TM/NIM : 2014/14042024  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik  
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 02 Agustus 2018

Tim Penguji:

Nama	Tanda Tangan
Ketua : Drs. Syamsir, M.Si, Ph. D	1 
Sekretaris : Dra. Jumiati, M.Si	2 
Anggota : Drs. M. Fachri Adnan, M.Si, Ph. D	3 
Anggota : Adil Mubarak, S.IP, M.Si	4 

Mengesahkan  
Dekan FIS UNP



Prof. Dr. Syafrin Anwar, M.Pd  
NIP. 19621001 198903 1 002

## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fakri Marsal  
TM/NIM : 2014/14042024  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik  
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Gaya Kepemimpinan Wali Nagari Dalam Pengelolaan Keuangan Nagari di Kenagarian Sumanik dan Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar”** adalah benar hasil karya saya dan bukan merupakan plagiat dari karya orang lain, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini sesungguhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulis.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 02 Agustus 2018  
Yang



Fakri Marsal  
2014/14042024

## **PERSEMBAHAN**



*Cukuplah Allah bagiku, tiada tuhan selain dia. Hanya kepadanya aku bertawakkal (Qs. Attaubah 129) Ya Allah, diperjalanan hidupku banyak kutemukan hal berarti, kesempurnaan cinta dan kasih sayang engkau berikan kepadaku hambamu. Sekarang engkau masih mengizinkan aku berjuang melewati tahapan sembariku pernah bermimpi dahulu. Semoga disetiap langkah ku engkau berikan ridho dan keberkahan. Shalawat beserta salam Semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Saw.*

*Karyaku ini kupersembahkan untuk kedua orangtuaku tersayang, ayahanda ku (M. Dayan) dan Ibunda ku (Warniati). Tidak pernah mengenal kata letih untuk berjuang memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya, yang selalu tulus mendoakan, selalu memberikan kekuatan dan motivasi untukku. Untuk kedua abangku yang menjadi inspirator Bang Arif Purnawan, Bang Hudia Zulhamdi serta kedua adikku tersayang Hadia Wardana, Dania Irhami dan teruntuk penyemangat didalam hidupku Puput Mia Anjela.*

*Kepada Dosen pembimbing Bapak Drs. Syamsir M. Si. Ph.D dan Ibu Dra Jumiati M. Si yang telah membimbing mengarahkan dan meberikan motivasi dalam pembuatan skripsi ini. Terimakasih kepada Bapak Drs. Karjuni Dt. Maani M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA), kepada Bapak/Ibu Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Publik para pahlawan tanpa tanda jasa dan kepada rekan-rekan Ilmu Administrasi Publik yang sama-sama merasakan*

*pengalaman dan perjuangan dengan saya semoga kita semua sukses kedepannya, aamiin.*

*Terimakasih untuk keluarga besar UK-WP2Sospol yang telah memberikan saya pengalaman luar biasa, keluarga besar Garuda Community yang selalu semangat mengangkasa, rekan-rekan aktivis seperjuangan di BEM FIS 56 Kabinet bersatu yang banyak memberikan kesan berharga dan pengalaman yang tidak akan terlupakan, rekan-rekan BEM Universitas Negeri Padang 67 Kabinet Sinergi yang pernah menjadi persinggahan, rekan-rekan Ikatan Mahasiswa Pasaman, Komunitas Bonsai satu hati sejuta aksi.*

*Terimakasih untuk semuanya, telah memberikan kesan berarti dihidupku dan karyaku ini ku persembahkan untuk kalian semua.*

*Padang, 25 Juli 2018*

*Fakri Marsal S. AP*

## ABSTRAK

### **FAKRI MARSAL 14042024/2014 : Gaya Kepemimpinan Wali Nagari Dalam Pengelolaan Keuangan Nagari Di Kenagarian Sumanik Dan Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar**

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan bagaimana Gaya Kepemimpinan Wali Nagari Dalam Pengelolaan Keuangan Nagari Di Kenagarian Sumanik Dan Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kurangnya koordinasi Wali Nagari terhadap Perangkat nagari dalam mengelola keuangan nagari, belum terlaksananya Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa dan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) di nagari yang tinggi dikarenakan pengelolaan keuangan yang lambat.

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan penelitian ditentukan secara *purposive sampling* dan *random sampling*. Data dikumpulkan dengan cara melakukan wawancara, observasi dan studi dokumentasi serta direduksi agar bisa ditarik kesimpulan dari data yang telah didapat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Wali nagari Sumanik dominan menerapkan gaya kepemimpinan otoriter dilatar belakangi oleh sifat Wali nagari yang disiplin dan tegas. Gaya kepemimpinan yang diharapkan yaitu gaya demokratis (2) Wali nagari Tabek Patah dominan menerapkan gaya kepemimpinan demokratis dilatar belakangi oleh jiwa sosial Wali nagari yang tinggi serta dekat dengan masyarakat, sedangkan gaya kepemimpinan yang diharapkan yaitu gaya demokratis.

Kata Kunci : Gaya, Kepemimpinan, Wali nagari, Pengelolaan, Keuangan, Tanah Datar.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberi rahmat dan hidayah-NYA kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Gaya Kepemimpinan Wali Nagari Dalam Pengelolaan Keuangan Nagari Di Kenagarian Sumanik Dan Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar”**. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik Strata Satu (S1) pada jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi materi maupun teknik penulisannya, semua ini karena keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada penulis. Oleh sebab itu penulis mengharapkan kritikan dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
2. Ibu Dra. Jumiati, M.Si selaku ketua jurusan Ilmu Administrasi Publik yang telah membantu penulisan skripsi ini.

3. Bapak Zikri Alhadi S.IP, M.A selaku Sekretaris jurusan Ilmu Administrasi Publik.
4. Bapak Drs. Syamsir, M.Si, Ph.D sebagai dosen pembimbing I dan Ibu Dra. Jumiati, M.Si sebagai pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
5. Bapak Drs. M. Fachri Adnan, M.Si., Ph.D. Bapak Adil Mubarak, S.IP., M.Si. dan ibu Nora Eka Putri, S.IP, M.Si sebagai dosen penguji yang telah memberikan kritikan dan saran demi kesempurnaan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Publik sebagai inspirasi yang banyak menanamkan nilai-nilai serta ilmu pengetahuan.
7. Bapak Irama Yandi S.Ap selaku Wali nagari Sumanik, Bapak Irwan S.Ap selaku Sekretaris nagari Sumanik, Ibu Ulfa Dwi Utami selaku Bendahara nagari Sumanik, Bapak Rado Putra Amd selaku Kaur Pembangunan nagari Sumanik, Bapak Mulia Indera selaku Ketua BPRN Sumanik, Bapak Andi Dt. Kayo selaku ketua KAN Sumanik, Bapak Novendri selaku Kepala Jorong Guguak Tinggi, Bapak Jon Hendri selaku Kepala Jorong Guguak Panjang, Bapak Krisman Dt. Rajo Nan Kayo selaku Wali nagari Tabek Patah, Ibu Desi Indrayana S.Sos selaku Sekretaris nagari Tabek Patah, Ibu Amelia Roza selaku Bendahara nagari Tabek Patah, Bapak Arif Rahmad Hakim selaku Kaur Pemerintahan nagari Tabek Patah, Ibu Revita Desra S.Pd selaku Kaur Umum dan Keuangan nagari Tabek Patah, Ibu Nila

Kusuma selaku Kaur Kesra nagari Tabek Patah, Bapak Datuk Mantiko Marajo selaku Sekretaris KAN nagari Tabek Patah, Bapak Sofyan selaku Wakil ketua BPRN nagari Tabek Patah, Bapak Muhammad Taufik selaku Sekretaris BPRN nagari Tabek Patah, Bapak Zulkifli selaku Kepala Jorong Koto dan Bapak Arifin selaku Kepala Jorong Koto Alam.

8. Bapak Wali nagari, Sekretaris, Bendahara beserta Kepala Urusan, BPRN, KAN di nagari Sumanik dan Tabek Patah yang telah mau memberikan data dalam penulisan skripsi ini.
9. Bapak Kepala Jorong Guguak Panjang, Kepala Jorong Koto Alam, dan Kepala Jorong Tabek Patah yang telah bersedia diwawancarai.
10. Teristimewa buat orangtuaku Bapak M. Dayan dan Ibu Warniati serta kedua Abangku Arif Purnawan, Hudia Zulhamdi, kedua adikku Hadia Wardana dan Dania Irhami serta kepada inisiator di hidupku Puput Mia Anjela, yang telah memberikan doa dan kasih sayang yang tulus kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Rekan-rekan seperjuangan yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu.

Akhirnya penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas semuanya dengan pahala yang berlipat ganda. Amin.

Padang, Juli 2018

Penulis

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	viii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	10
C. Batasan Masalah .....	10
D. Rumusan Masalah .....	11
E. Tujuan Penelitian.....	11
F. Manfaat Penelitian.....	12
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Kajian Teori .....	13
1. Kepemimpinan .....	13
2. Gaya Kepemimpinan .....	15
3. Wali Nagari .....	29
4. Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari.....	31
5. Pelaksanaan APBDesa/APBNagari.....	34
6. Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari.....	35
B. Kerangka Berpikir .....	42

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	43
B. Lokasi Penelitian .....	43
C. Informan Penelitian .....	44
D. Jenis, Sumber, Teknik dan Alat Pengumpulan Data .....	46
E. Uji Keabsahan Data .....	48
F. Teknik Analisis Data .....	49

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Temuan umum.....	51
B. Temuan khusus .....	61
C. Pembahasan .....	81
1. Gaya Kepemimpinan Wali Nagari Dalam Pengelolaan Keuangan Nagari di Kenagarian Sumanik Dan Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten tanah Datar.....	81
2. Gaya Kepemimpinan Yang Lebih Dominan.....	94
3. Gaya Kepemimpinan Yang Diharapkan.....	100

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	90
B. Saran .....	91

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>107</b>
-----------------------------	------------

### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 1. Informan Penelitian.....	45
Tabel 2. Data Pokok Kecamatan Salimpaung.....	53
Tabel 3. Luas Nagari, Jorong dan Persentase Terhadap Luas Kecamatan Salimpaung, 2016 .....	59
Tabel 4. Data Pokok Kecamatan Salimpaung.....	60

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 1. Kerangka Berpikir .....	42
Gambar 2. Struktur Organisasi Kecamatan Salimpaung.....	34
Gambar 3. Peta Wilayah Kecamatan Salimpaung .....	53
Gambar 4. Struktur Organisasi Pemerintahan Nagari Sumanik.....	57
Gambar 5. Struktur Organisasi Pemerintahan Nagari Tabek Patah.....	58

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Ditengah perubahan dan perkembangan dinamika kehidupan politik pemerintahan dewasa ini, disadari baik secara internal maupun eksternal, terdapat isu sentral yang menjadi wacana publik, yaitu perlunya pembagian kekuasaan kewenangan yang seimbang antara pemerintah pusat dan daerah guna meningkatkan kemandirian daerah mengelola rumah tangganya sendiri dalam hubungan yang serasi antara daerah dengan pemerintah pusat, di daerah terdapat pembagian wilayah secara administratif sampai kepada sistem pemerintahan terendah yaitu desa dan nagari. Dalam undang-undang Republik Indonesia No. 6 tahun 2014 tentang desa menyebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Struktur organisasi pemerintah desa terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa. Kepala Desa adalah penyelenggara dan penanggung jawab utama bidang pemerintahan dan pembangunan desa serta kemasayarakatan dan urusan-urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa diberi kewenangan oleh undang-undang untuk memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa serta menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa. Keberhasilan penyelenggaraan Pemerintah desa

dapat berjalan dengan lancar dan baik karena didukung oleh banyak faktor. Salah satu yang terpenting adalah keuangan desa. Dalam mengelola keuangan desa, Kepala Desa dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain hal yang bersifat pribadi dan hal yang diluar kemampuan pemerintah desa. Peran Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber keuangan desa adalah sebagai pelaksana sekaligus pengawas atas kegiatan atau usaha desa dalam mengelola keuangan desa. Selain itu Kepala Desa juga melakukan pertanggungjawaban disetiap akhir tahun anggaran dalam bentuk membuat dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), (Fitri 2006 : 16). Pengelolaan keuangan desa meliputi : perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Kepala Desa berkewajiban untuk melakukan pengelolaan keuangan desa yaitu berupa semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban tersebut kemudian menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan Permendagri 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa menyebutkan bahwa keuangan desa dikelola dengan berdasarkan asas asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan akhir tahun, selain itu juga Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes akhir tahun, dan

di informasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan dana desa yang tertib, transparan, akuntabel, dan berkualitas.

Pemerintahan terendah di Sumatera Barat dikenal dengan nagari yang memiliki posisi sejajar dengan desa, desa maupun nagari dalam hal ini mempedomani undang-undang nomor 6 tahun 2014, berdasarkan undang-undang tersebut ditetapkan desa menjadi dua, yaitu desa adat dan desa. Pemerintah Sumatera Barat memilih desa adat maka posisi nagari dapat disebut dengan desa adat. Nagari menurut perda Sumatera barat nomor 2 tahun 2007 adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dalam hal adat istiadat. Pemerintahan nagari berlaku dan ditetapkan diseluruh kabupaten/kota di provinsi Sumatera Barat.

Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu kabupaten yang berada dalam provinsi Sumatera Barat, dengan Ibu kota Batusangkar. Kabupaten ini merupakan kabupaten terkecil kedua untuk wilayah luas wilayah di Sumatera Barat, memiliki 14 kecamatan, 75 Nagari dan 395 Jorong. Kabupaten Tanah Datar merupakan daerah agraris, lebih dari 70% penduduknya bekerja disektor pertanian (*Wikipedia*). Pedoman pengelolaan keuangan nagari di Tanah Datar diatur dalam peraturan bupati Tanah Datar Nomor 11 Tahun 2014. Salah satu kecamatan yang berada di Tanah Datar yaitu Kecamatan salimpaung, wilayah administasi Kecamatan Salimpaung terdiri dari 6 Nagari (setingkat kelurahan), dan 27 jorong (setingkat RW). Dilihat dari luas wilayah Nagari, maka Nagari yang paling kecil

luasnya adalah Nagari Supayang dengan luas 5,30 Km<sup>2</sup>, sedangkan Nagari yang paling luas adalah Nagari Lawang Mandahiling (15,50 Km<sup>2</sup>) (*Salimpaung Dalam Angka 2016*). Diantara beberapa nagari yang ada di Kecamatan Salimpaung terdapat dua nagari dalam penelitian ini yaitu nagari Sumanik dan nagari Tabek Patah. Nagari tersebut menerapkan sistem pemerintahan yang sama dengan nagari-nagari lainnya, dimana masing-masing memiliki batas-batas wilayah serta dipimpin oleh seorang Wali nagari. Sumanik terdiri dari enam Jorong dan nagari Tabek Patah yang terdiri dari empat Jorong, Wali nagari dalam kepemimpinannya dibantu oleh Sekretaris, Bendahara, Kepala Urusan nagari serta dibantu dan diawasi oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN), lembaga Badan Perwakilan Rakyat Nagari (BPRN) dan melibatkan masyarakat secara umum.

Kewenangan dalam mengelola keuangan nagari dan mewakili pemerintah nagari dalam kepemilikan kekayaan nagari yang dipisahkan adalah Wali Nagari, maka peran Wali nagari sebagai pemimpin sangat penting dalam mengelola keuangan nagari. Sementara besaran alokasi dana nagari dalam Kabupaten Tanah Datar diatur dalam peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 10 tahun 2016, dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa Wali Nagari dalam melakukan pengelolaan alokasi dana nagari harus mempedomani peraturan Bupati tentang pedoman pengelolaan keuangan nagari dan peraturan terkait lainnya, maka dalam hal ini kepemimpinan dapat mempengaruhi pengelolaan keuangan. Dana desa merupakan suplay dari pemerintah sebagai sarana penunjang untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ada di sebuah desa, dimana bantuan tersebut digunakan sebagai fasilitas masyarakat dalam mengembangkan dan memajukan

produktifitas sebuah desa, dengan demikian dapat dipahami bahwa persoalan pengelolaan keuangan tidak dapat dilepaskan dari persoalan kepemimpinan.

Toha dalam Badrudin (2013 : 163) mengemukakan bahwa suatu organisasi akan berhasil atau gagal sebagian bisa ditentukan oleh gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan seorang leader merupakan faktor penting yang mempengaruhi kinerja keuangan, pemimpin yang baik akan mengambil suatu keputusan yang paling menguntungkan bagi organisasi dibandingkan dengan keputusan sebelumnya maka kepemimpinan sangatlah mempengaruhi pengelolaan keuangan. Kepemimpinan dalam konteks penelitian ini yang akan dikaji adalah mengenai gaya kepemimpinan otoriter, gaya kepemimpinan demokratis, dan gaya kepemimpinan *laissez faire*. Gaya kepemimpinan yang mana yang sebaiknya dijalankan? Jawaban dari pertanyaan ini adalah tergantung pada kondisi anggota organisasi itu sendiri. Gaya kepemimpinan otoriter biasanya pemimpin merasa bahwa mereka mengetahui apa yang mereka inginkan dan cenderung mengekspresikan kebutuhan-kebutuhan tersebut dalam bentuk perintah-perintah langsung kepada bawahan. Sedangkan gaya kepemimpinan demokratis, gaya ini berasumsi bahwa para anggota organisasi terlibat dalam melaksanakan keputusan dan proses pembuatannya, walaupun yang membuat keputusan akhir adalah pemimpin, setelah menerima masukan dan rekomendasi dari anggota organisasi. Gaya kepemimpinan yang terakhir yaitu *laissez faire*, pendekatan gaya kepemimpinan ini bukan berarti tidak adanya sama sekali pimpinan tetapi berasumsi bahwa suatu tugas diberikan kepada bawahan, dalam menentukan

teknik-teknik pengerjaan tugas dilakukan sendiri guna tercapainya tujuan dan sasaran organisasi. (Pasolong, 2008:46-47)

Pengelolaan keuangan nagari sudah disusun berdasarkan aturan dan teknis pelaksanaan, pemimpin diberikan kewenangan dan tanggung jawab dalam mengelola keuangan nagari. Namun dalam pengelolaan keuangan nagari baik di nagari Sumanik maupun Tabek Patah ditemukan beberapa hambatan, misalnya di nagari Tabek Patah ditemukan komunikasi antara wali nagari dengan perangkat nagari kurang terjalin dengan harmonis dikarenakan sikap apatisme pimpinan terhadap bawahan, menurut informasi yang penulis dapatkan dari Ibu Desi selaku Sekretaris nagari di Tabek Patah pada tanggal 22 September 2017 mengatakan bahwa;

“Wali Nagari jarang berada di kantor, keluhan kami selaku perangkat nagari sulit untuk disampaikan kepada Wali Nagari, sehingga permasalahan serta kesulitan dalam pengelolaan keuangan tidak diketahui oleh Wali Nagari kami sendiri”.

Permasalahan lain yang penulis dapatkan dari sekretaris nagari Tabek Patah yang menyebutkan bahwa kurangnya dorongan dari Wali nagari kepada Perangkat nagari dalam membuat laporan pertanggung jawaban (LPJ) sehingga Perangkat nagari selalu lambat dalam pembuatan LPJ. Permasalahan lain di nagari Tabek Patah dilihat dari kurangnya koordinasi Wali nagari tentang pelaksanaan pengelolaan keuangan yang baik dan benar menurut aturan yang ada, berdasarkan informasi dari Ibu Nila Kusuma selaku Kaur Kesra di nagari Tabek Patah pada tanggal 22 September 2017 mengatakan:

“Kesulitan kami dalam mengelola keuangan salah satunya kurang kejelasan tentang bagaimana format Laporan Pertanggung jawaban yang sebenarnya, Bapak Wali hanya memberikan kami dokumen tertulis, kemudian kami lah yang membaca dan memahaminya sendiri, beliau hanya mengatakan begini format LPJ yang benar, seharusnya Bapak Wali menjelaskan dan memantau kami secara langsung”.

Kurangnya perhatian Wali nagari terhadap kinerja perangkat nagari merupakan salah satu penyebab pengelolaan keuangan yang lambat, Wali nagari yang baik akan berusaha membawa organisasi kearah yang lebih baik yaitu dengan bekerja secara efektif, melakukan pengawasan yang baik serta memiliki kebijaksanaan. Wali nagari Tabek Patah masih kurang dalam segi bijaksana, hal ini disampaikan oleh Sekretaris KAN Tabek Patah yaitu Bapak Datuk Mantiko Marajo pada tanggal 03 Oktober 2017:

“Wali nagari sekarang dari segi komunikasi dia bagus, pandai bermasyarakat. Apapun acara yang dilaksanakan di nagari beliau datang, diundang mendoa dia hadir sampai selesai. Cuman dari segi kebijaksanaan beliau kurang, kelemahan beliau itu, kurang bisa melobi keatas, kurang dekat dengan Camat atau Bupati, Wali nagari kan seharusnya gitu, mampu bikjaksana dan memiliki kecakapan”.

Berdasarkan Permendagri 113 tahun 2014 kewenangan dalam pengelolaan keuangan desa/nagari dipegang oleh Kepala desa/Wali nagari, jadi yang bertanggungjawab atas kendala atau keterlambatan pengelolaan keuangan yaitu Wali nagari. Pengelolaan keuangan yang lambat akan menimbulkan SiLPA (Sisa Lebih Penghitungan Anggaran). Apabila SiLPA di suatu nagari jumlahnya banyak akan menyebabkan anggaran periode selanjutnya dikurangi, nagari harus menerima anggaran tahunan yang lebih sedikit, sedangkan SiLPA pada tahun 2016 di nagari Sumanik Rp 327,454,241. Permasalahan lain di nagari Sumanik yaitu: hampir dipenghujung akhir tahun anggran yaitu bulan oktober 2017 nagari

Sumanik belum menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan total dana sebesar Rp506.631.600, Hal tersebut mengakibatkan 72 nagari di kabupaten Tanah Datar terkendala pencairan ADD tahap II yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). (*Antra sumbar*). Apabila merujuk pada Permendagri 113 tahun 2014 yang mengatakan bahwa pemimpin diwajibkan menyampaikan laporan realisasi penggunaan anggaran dan laporan pertanggungjawaban maka dari kasus tersebut realisasi dan pertanggungjawaban Wali nagari belum terlaksana berdasarkan Permendagri 113 tahun 2014.

Peran kepemimpinan sangat dibutuhkan dalam segala hal, gaya kepemimpinan bertujuan untuk mempengaruhi kinerja serta norma perilaku yang menjadi identitas dari pemimpin tersebut. Munculnya kebijakan yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat seharusnya dapat dibenahi dengan baik agar sesuai dengan kondisi masyarakat tersebut, seperti yang di kutip dari “Barito Sumanik” bulan Februari 2016 tentang harapan untuk nagari Sumanik “Yang diinginkan masyarakat bawah itu adalah Wali nagari yang mengerti dengan perasaan susah masyarakat”. Untuk itu dibutuhkan pemimpin yang bisa menjawab keresahan masyarakat. Didalam Permendagri 113 tahun 2014 menyebutkan bahwa “Pemerintah desa dilarang melakukan pemungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan desa”, namun di nagari Sumanik pelayanan administrasi masih ditemukan adanya pungutan, hal ini tentu tidak sesuai dengan yang telah diamankan didalam Permendagri 113 tahun 2014 tersebut. Kemudian seperti yang disampaikan oleh Fitra Yadi selaku pemuda di nagari Sumanik yang mengatakan;

“Andai kata ada calon Wali Nagari yang mau menggratiskan semua urusan surat menyurat di kantor Wali Nagari Sumanik, dipastikan ia akan terpilih menjadi Wali Nagari nantinya”. (6/2/16)

Dalam pengelolaan Keuangan desa, baik desa ataupun nagari dipimpin oleh seorang Kepala Desa atau Wali Nagari yang mempunyai tugas melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa (Permendagri 113 tahun 2014). Namun di nagari sumanik masih diberlakukannya biaya administrasi hingga mencapai pembayaran sebanyak dua puluh ribu rupiah dalam pelayanan surat menyurat (*Barito Sumanik*). Permasalahan lain yang dirasakan oleh masyarakat adalah Wali nagari jarang berada di kantor dikarenakan adanya kesibukan lain dimana Wali nagari sering berada di Pusat kota Batusangkar dibandingkan di kantornya sendiri yaitu di nagari. Menurut informasi yang didapatkan oleh penulis, Wali nagari adalah pegawai di Dinas Pertanian Tanah Datar, seperti yang disampaikan oleh bapak Saun selaku tokoh masyarakat di nagari Sumanik, beliau mengatakan;

“Seharusnya Wali nagari mudah untuk ditemui, namun kenyataannya sangat susah, untuk menemuinya saja kadang-kadang kami harus pergi ke Batu Sangkar, beliau juga merupakan pegawai di Dinas pertanian Tanah Datar”. (4 Juli 2018)

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis ingin mendapatkan gambaran yang lebih rinci mengenai **“Gaya Kepemimpinan Wali Nagari Dalam Pengelolaan Keuangan Nagari di Kenagarian Sumanik dan Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang yang telah ditulis, maka dapat dilihat beberapa identifikasi masalah yang akan dijadikan sebagai bahan penelitian;

1. Kurangnya koordinasi Wali Nagari terhadap Perangkat Nagari dalam pengelolaan keuangan nagari.
2. Belum terlaksananya Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.
3. Wali Nagari yang jarang berada di kantor sehingga sulit untuk berkomunikasi.
4. Kurangnya sosialisasi penggunaan anggaran oleh Wali Nagari terhadap Perangkat Nagari.
5. Sisa Lebih Penggunaan Anggaran yang tinggi dikarenakan kinerja pengelolaan keuangan yang lambat.

## **C. Batasan Masalah**

Agar permasalahan yang diteliti tidak terlalu luas, maka penulis membatasi masalah yakni permasalahan berkisar pada gaya kepemimpinan Wali nagari dalam pengelolaan keuangan nagari di Kenagarian Sumanik dan Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar, dalam hal ini diatur dalam pasal 4 ayat (1) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Sehingga keuangan nagari dapat dikelola berdasarkan asas-asas yang telah disebutkan di latar belakang ini.

#### **D. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian digunakan untuk menunjukkan apa yang sebenarnya akan diteliti terkait masalah dalam penelitian tersebut, dan juga untuk menentukan batasan-batasan penelitian agar fokus penelitian jelas pada hal-hal yang benar-benar diteliti.

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang diatas maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut;

1. Bagaimana pengelolaan keuangan nagari di Kenagarian Sumanik dan Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten tanah Datar?
2. Bagaimana gaya kepemimpinan Wali nagari dalam pengelolaan keuangan nagari di kenagarian Sumanik dan Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, adapun tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui pengelolaan keuangan nagari di Kenagarian Sumanik dan Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten tanah Datar.
2. Untuk mengetahui gaya kepemimpinan Wali nagari dalam pengelolaan keuangan nagari di kenagarian Sumanik dan Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar.

## **F. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian oleh penulis yaitu;

### 1. Manfaat teoritis;

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya teori terkait dengan keilmuan manajemen sumberdaya manusia serta administrasi keuangan publik.

### 2. Manfaat praktis;

Penelitian ini bermanfaat bagi :

- a) Agar menjadi bahan acuan bagi Wali nagari dalam membuat kebijakan.
- b) Untuk memberikan masukan bagi Pemerintah nagari dalam menerapkan gaya kepemimpinan yang dominan dan diharapkan dalam pengelolaan keuangan nagari.